



---

## Implementasi Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Good Governance Di Kelurahan Terjun Medan Marelان

Anastasya Sembiring<sup>1</sup>, Anisa Amelia Purba<sup>2</sup>, Mikha Valdo T. Tambunan<sup>3</sup>,  
Nur Cahyu Azizah<sup>4</sup>, Julia Ivanna<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [anastasyakembaren27@gmail.com](mailto:anastasyakembaren27@gmail.com), [purbaanisaamelia@gmail.com](mailto:purbaanisaamelia@gmail.com),  
[valdotambunan101005@gmail.com](mailto:valdotambunan101005@gmail.com), [nurcahyuazizah@gmail.com](mailto:nurcahyuazizah@gmail.com), [juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study is motivated by the suboptimal waste management and the low level of community participation in supporting government policies in Terjun Village, Medan Marelان District. This study aims to analyze the implementation of public policy on community-based waste management from a good governance perspective. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, waste bank managers, and the community. The results show that the implementation of waste management policy has not been optimal. This is indicated by the low level of public understanding and participation, as well as the lack of policy socialization. Community-based programs such as waste banks have not been sustainably implemented. In addition, the principles of transparency and accountability have not been fully applied, affecting policy effectiveness. The inhibiting factors include limited resources, lack of coordination, and low public awareness. In conclusion, the implementation of waste management policy needs improvement through strengthening community participation and applying good governance principles.*

**Keywords:** Public Policy Implementation, Waste Management, Community Participation, Good Governance

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan sampah serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam perspektif good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat kelurahan, pengurus bank sampah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Program berbasis masyarakat seperti bank sampah juga belum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas belum diterapkan secara maksimal sehingga mempengaruhi efektivitas kebijakan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, serta rendahnya*

---

*kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan melalui penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip good governance.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat, Good Governance*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah telah menjadi isu global yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. *United Nations Environment Programme* (2023) memperkirakan bahwa produksi sampah domestik global akan mencapai 3,8 miliar ton per tahun pada 2050, dengan sebagian besar berasal dari negara berkembang yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah secara efektif dan berkelanjutan. Di Indonesia, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah sampah nasional mencapai 38,7 juta ton per tahun, sementara tingkat pengurangan sampah baru sekitar 13,68% (Silalahi & Nafi'ah, 2025).

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya perubahan paradigma dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan dan penanganan sampah berbasis sumber. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan semacam proporsional, efektif, dan efisien (Mariane, Gnagey, Karali, & Hardiyanti, 2025).

Pengelolaan sampah yang baik merupakan (*good governance*) indikator penting keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem kelembagaan, kebijakan dan program lingkungan dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Manusia berperan penting dalam mengelola dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memerlukan kerjasama pemerintah, masyarakat setempat dan pihak lain untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa kecuali. Ini tidak terbatas pada dimanapun tempat tinggalnya, baik masyarakat terpencil, pedesaan maupun perkotaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat (Harbowo & Chandra, 2024).

Dalam perspektif *good governance*, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. *Good governance* menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dalam menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Pernyataan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH). Di dalam UUPPLH telah diatur mengenai asas dimana lebih spesifik dalam Pasal 2 (dua) huruf m menyatakan bahwa: "Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik" (Mumpuni & Kusumawati, 2021). Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pengelolaannya yang harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat masih belum optimal. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasinya di tingkat masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tidak sampai disitu, di dalam pengimplementasian kebijakan tentang pengelolaan sampah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Oleh karenanya permasalahan ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti untuk mengetahui bentuk kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Terjun. Sehingga penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji implementasi kebijakan publik tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam perspektif *good governance* di Kelurahan Terjun Medan Marelan. Apabila produksi sampah yang terus meningkat jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, penurunan kualitas hidup masyarakat, hingga terjadinya bencana alam.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Terjun, Medan Marelan, serta hubungannya dengan prinsip *good governance*. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh dalam konteks nyata, sehingga dapat menangkap dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur kelurahan, pengurus bank sampah, dan warga masyarakat yang berpartisipasi, observasi langsung di lokasi pengelolaan sampah, serta dokumentasi berupa kebijakan dan laporan terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan keterkaitan antara implementasi kebijakan dan prinsip *good governance*. Selain itu, metode ini bersifat iteratif dan fleksibel, memungkinkan peneliti menyesuaikan instrument pengumpulan data sesuai kondisi lapangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data, yaitu membandingkan informasi dari aparatur, masyarakat, dan dokumen resmi, sehingga hasil penelitian memiliki keakuratan dan relevansi yang tinggi terhadap fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun partisipasi masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan empat narasumber yang terdiri dari aparatur kelurahan, masyarakat, dan petugas pengangkut sampah, serta dokumentasi terkait kondisi pengelolaan sampah di wilayah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Terjun tidak dirumuskan secara mandiri oleh pihak kelurahan, melainkan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kelurahan lebih sebagai pelaksana kebijakan (implementor), sehingga ruang inovasi kebijakan di tingkat lokal relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kebijakan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kelurahan Terjun, terutama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kelurahan Terjun menjadi faktor penting yang memengaruhi sistem pengelolaan sampah. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Kelurahan Terjun tidak diperkenankan memiliki TPS karena lokasi TPA berada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan pola pengangkutan langsung dari sumber sampah menuju TPA. Pengangkutan dilakukan melalui berbagai sarana, seperti mobil sampah pemerintah, becak sampah, serta jasa pengangkutan mandiri oleh masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih berfokus pada aspek teknis pengangkutan dan pembuangan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengelolaan sampah yang diterapkan masih didominasi oleh pendekatan *collect-transport-dispose* (angkut dan buang). Pendekatan ini cenderung belum sejalan dengan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan pada pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah dari sumbernya. Akibatnya, volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat tanpa adanya upaya signifikan untuk menguranginya sejak dari tingkat rumah tangga. Dalam konteks pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pihak kelurahan sebenarnya pernah menginisiasi program bank sampah di beberapa lingkungan, seperti Lingkungan 6, 12, dan 19. Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar melakukan pemilahan sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkan. Secara konseptual, program bank sampah merupakan langkah yang tepat dalam mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut tidak berjalan secara berkelanjutan dan saat ini tidak lagi aktif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat dan kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman terkait pengelolaan sampah, serta belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis masyarakat sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.

---

Dari perspektif masyarakat dan petugas lapangan, pengelolaan sampah di Kelurahan Terjun dinilai masih belum maksimal. Masyarakat umumnya hanya berperan sebagai pengguna layanan pengangkutan sampah, tanpa dilibatkan dalam proses pengelolaan secara langsung. Sementara itu, petugas pengangkut sampah menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap kondisi lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait fasilitas pendukung dan kondisi lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan secara administratif dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat dan petugas di lapangan. Jika dianalisis menggunakan perspektif *good governance*, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Terjun masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat masih rendah karena masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dari aspek akuntabilitas, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kelurahan merasa telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masyarakat menilai bahwa peran tersebut belum dirasakan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dengan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dari aspek efektivitas, pengelolaan sampah telah berjalan dalam bentuk pengangkutan rutin dan keberadaan petugas kebersihan. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas pada upaya menjaga kebersihan lingkungan, belum mampu mengurangi volume sampah secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, khususnya dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya. Selanjutnya, dari aspek responsivitas, masih terdapat berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti penyediaan tempat sampah terpilah, peningkatan fasilitas bagi petugas kebersihan, serta perhatian terhadap dampak lingkungan di sekitar TPA. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih tanggap dalam merespons kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan. Dari aspek kolaborasi, sebenarnya terdapat peluang untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam pengelolaan sampah. Pihak kelurahan juga menunjukkan keterbukaan terhadap kerja sama tersebut. Namun, dalam praktiknya kolaborasi ini belum berjalan secara optimal, sehingga pengelolaan sampah masih didominasi oleh pendekatan konvensional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Terjun masih berorientasi pada pelayanan pengangkutan sampah, bukan pada pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat masih bersifat pasif dan belum mencerminkan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang lebih komprehensif, antara lain melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pengaktifan kembali program bank sampah, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah

---

di Kelurahan Terjun diharapkan dapat berkembang menjadi lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *good governance*, sehingga tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga pada pengelolaan yang berorientasi pada pengurangan dan pemanfaatan sampah dari sumbernya.

## SIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, belum berjalan secara optimal. Pengelolaan sampah yang berlangsung saat ini masih berorientasi pada kegiatan pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga belum mencerminkan pendekatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah, di mana masyarakat umumnya hanya berperan sebagai pengguna layanan tanpa terlibat aktif dalam kegiatan pemilahan, pengolahan, maupun pemanfaatan sampah. Ditinjau dari perspektif *good governance*, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kelemahan pada aspek partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan kolaborasi. Meskipun pernah terdapat upaya melalui program bank sampah, implementasinya belum berjalan secara berkelanjutan sehingga belum memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan peran pemerintah kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat, peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat sampah terpilah. Selain itu, pengaktifan kembali program bank sampah dan pengembangan kolaborasi dengan pihak swasta dapat menjadi alternatif strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pengelolaan sampah yang lebih inovatif dan berkelanjutan, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Harbowo, R., & Chandra, P. S. (2024). Analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tuah Madani. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 1-12.
- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A., & Hardiyanti, E. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 93-108.
- Mumpuni, N. W., & Kusumawati, M. P. (2021). *Good governance* pengelolaan sampah: Komitmen negara terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 79-89.
- Namira, F., & Azhar. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muara Enim berdasarkan teori Edwards III. *Jurnal Perspektif*, 858-862.

- Nasution, M. J., Wulandari, C., Wahono, E. P., & Bakri, S. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi: Studi kasus tentang efektivitas dan relevansi dengan undang-undang lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Kelitbangan*, 143-156.
- Sharla, D. F., & Harlis, F. P. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup (studi di Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1-25.
- Silalahi, C. M., & Nafi'ah, B. A. (2025). Strategi pengelolaan sampah berbasis good environmental governance di Desa Latsari Kabupaten Jombang. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 962-972.
- Tiansyah, N. A., & Rahayu, R. K. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang pada tahun 2022-2023. *Journal of Governance and Policy*, 50-67.
- Zalukhu, T., & Habibie, D. K. (2024). Pengelolaan sampah dalam ranah kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 139-146.